

ABSTRAK

Cindry Dwi Puspita: *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) di Kabupaten Kuningan*

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kuningan. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanganinya, angka kemiskinan di wilayah ini tetap tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih terstruktur. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi dan lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi, implementasi, serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peraturan tersebut dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris dan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori negara hukum, teori implementasi kebijakan dan teori siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, RADPKT telah memuat strategi penanggulangan kemiskinan yang cukup komprehensif melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi inklusif. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan, perbedaan data antara BPS dan Dinas Sosial, serta kurangnya sinkronisasi antar instansi pelaksana. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini sejatinya telah mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, kurangnya akurasi data, serta belum tepatnya sasaran program bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Bupati ini telah mengarah pada model penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan sejalan dengan prinsip syariat maupun konstitusi, namun perlu adanya perbaikan dari sisi teknis, kelembagaan, serta penguatan kolaborasi antar pihak agar implementasinya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: RADPKT, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Siyasah Dusturiyah